

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bergulirnya era reformasi berdampak pada sistem ketatanegaraan di Indonesia, yaitu terjadi pergeseran paradigma dan sistem pemerintahan yang bercorak sentralistik di pemerintah pusat ke arah sistem pemerintahan yang desentralistik (*local democracy*) yang bertumpu pada pemerintahan daerah. Otonomi daerah memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta, prakarsa dan aspirasi masyarakat sendiri atas dasar pemerataan dan keadilan, serta sesuai dengan kondisi, potensi dan keragaman daerah otonomi masing-masing. Implikasinya adalah rakyat yang ada pada suatu daerah otonomi memiliki kesempatan untuk memilih calon kepala daerahnya secara langsung melalui mekanisme yang disebut dengan Pemilihan Kepala Daerah.

Pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pemilu merupakan mekanisme politik untuk mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat untuk menentukan format masa depan demokratisasi Indonesia. Melalui pelibatan langsung warga negara dalam kancah politik praktis inilah, secara esensial suara rakyat adalah suara Tuhan yang mengamanatkan terbentuknya sistem pemerintahan representatif yang berorientasi pada perubahan.

Pemilihan Kepala Daerah memiliki beberapa fungsi sebagaimana halnya pemilihan umum. Menurut Muhammad A.S. Hikam (2002: 21-23), fungsi-fungsi tersebut adalah legitimasi (pengakuan) politik, terciptanya perwakilan politik, sirkulasi elit politik dan pendidikan politik. Legitimasi politik dalam pemilu bermakna bahwa legitimasi pemerintah atau penguasa dikukuhkan karena pemerintah terpilih hakikatnya adalah pilihan rakyat terbanyak yang memiliki kedaulatan. Dalam hal ini, kebijaksanaan yang dibuat pemerintah selaku pembuat keputusan (*decission maker*) akan memperoleh dukungan atau sanksi yang kuat, karena keduanya berlandaskan sepenuhnya pada aspirasi rakyat, bukan pemaksaan.

Terciptanya perwakilan politik dalam pemilu bermakna bahwa seleksi kepemimpinan dan perwakilan dapat dilakukan secara lebih adil karena keterlibatan warga negara. Praktek demokrasi modern, yaitu melalui perwakilan dapat dilakukan. Sirkulasi elit politik dalam Pemilu menunjukkan adanya sirkulasi atau pergantian elit kekuasaan dilakukan secara lebih adil, karena warga negaralah yang langsung menentukan siapa yang masih dianggap memenuhi syarat sebagai elit politik dan siapa yang tidak. Secara tidak langsung ini pula menggambarkan bahwa Pemilu memiliki fungsi kontrol warga negara terhadap pemerintahnya.

Fungsi Pemilu lainnya adalah sebagai pendidikan politik bagi warga negara agar dapat memahami hak dan kewajiban politiknya. Melalui keterlibatan dalam proses pelaksanaan Pemilu, diharapkan warga negara akan mendapat pelajaran langsung tentang bagaimana selayaknya warga negara berkiprah dalam sistem demokrasi. Pada tataran selanjutnya akan semakin teguh pemahaman bahwa warga negara

adalah pemegang kedaulatan tertinggi dan sangat menentukan gerak serta perjalanan bangsa dan negara.

Pemilihan Kepala Daerah diselenggarakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, yang pada hari pemungutan suara dilakukan dengan mencoblos tanda gambar calon kepala daerah, agar para pemilih benar-benar mengetahui dan mengenal calon dan partai yang akan mereka pilih. Pemilihan kepala daerah secara langsung ini memiliki arti bahwa suara rakyat sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan politik. Terlebih lagi bagi partai politik, karena mau tidak mau partai politik berkewajiban mendengar dan merespon dengan tepat suara rakyat jika ingin masih tetap eksis dan berperan dalam percaturan pemerintahan dan politik. Upaya secara alamiah untuk memberdayakan partai politik menjadi penting untuk membentuk partai menjadi lebih kuat dan mandiri, sehingga melahirkan kebijakan partai yang berorientasi kerakyatan.

Hal tersebut yang akan lebih mendorong partai politik untuk memperluas kemampuan organisasi dan dalam mengembangkan pranata kelembagaan yang demokratis yang akan berdampak secara luas dan mendorong partisipasi rakyat. Partai politik merupakan sarana yang penting sebagai perwujudan kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pikiran dalam mengembangkan kehidupan demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Pada sistem demokrasi modern, keberadaan partai politik merupakan keniscayaan. Partai politik merupakan institusi kunci bagi demokrasi dan akan tetap menjadi satu-satunya kerangka institusional bagi proses representasi dan pemerintahan.

Sebelum pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah, setiap calon kepala daerah, partai politik dan tim suksesnya berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan sosialisasi mengenai diri dan program yang mereka tawarkan atau lazim disebut dengan kampanye. Melalui proses kampanye, masyarakat calon pemilih memiliki kesempatan maksimal untuk mendapatkan informasi kepala daerah, sebagai dasar bagi mereka dalam menentukan pilihan. Hal ini sesuai dengan konsep bahwa masyarakat merupakan sasaran kampanye yang dilakukan oleh para calon kepala daerah dan partai politik, yang menjanjikan berbagai program dan perubahan bagi masyarakat, seperti sembako murah, pendidikan murah, pengobatan murah dan sebagainya.

Kampanye dalam konteks ini merupakan serangkaian langkah yang ditempuh oleh partai politik dan calon kepala daerah dalam menyosialisasikan diri dan program mereka kepada masyarakat luas. Aktivitas kampanye pada dasarnya merupakan sosialisasi politik, karena pada prakteknya partai politik dan calon kepala daerah berkampanye menyosialisasikan diri mereka sebagai pelaku politik dan program mereka sebagai program politik pada masyarakat untuk diketahui, dikenal dan dipilih pada saat pemungutan suara. Hal ini selaras dengan pendapat Almond (dalam Miriam Budiardjo, 2000: 115), bahwa sosialisasi politik adalah suatu proses untuk memasyarakatkan nilai-nilai politik ke dalam suatu masyarakat. Sosialisasi politik menyangkut dua hal yaitu berlangsung secara terus menerus selama hidup seseorang dan dapat mengambil bentuk pembelajaran secara langsung atau tidak langsung.

Pelaksanaan kampanye memiliki tujuan tertentu, yakni agar masyarakat sebagai pemilih memiliki pengetahuan, kesadaran dan pemahaman sampai pada akhirnya diharapkan mereka akan menjatuhkan pilihan dengan memberikan suara mereka pada calon kepala daerah dan partai politik tertentu. Sebelum sampai pada tahap pemberian, kampanye yang dilakukan oleh calon kepala daerah ini tentunya akan mendapat tanggapan secara beragam dari masyarakat dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda sebagai sasaran kampanye.

Tanggapan atau opini tersebut dapat ditunjukkan pada aktivitas kampanye langsung yang dilakukan oleh calon-calon bupati, meliputi metode kampanye, materi kampanye, waktu kampanye dan program-program politik yang ditawarkan dalam kampanye. Opini pada dasarnya merupakan proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi ke dalam otak manusia yang terus menerus mengadakan hubungan dengan lingkungannya. Hubungan ini dilakukan lewat inderanya yaitu indera penglihatan, pendengaran, peraba, perasa, dan penciuman. Berdasarkan pengertian tersebut, informasi yang terdapat dalam kampanye calon kepala daerah masuk ke dalam otak dan memori masyarakat yang terus berinteraksi dalam kehidupannya, sehingga muncul pendapat atau tanggapan yang beragam mengenai proses kampanye tersebut.

Berdasarkan prasurvey pada pertimbangan-pertimbangan tertentu maka penulis akan melakukan penelitian di Desa Lempasing, sebagai salah satu desa yang ada di Wilayah Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran. Adapun pertimbangan-pertimbangan pemilihan sebagai lokasi penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Desa Lempasing merupakan salah satu desa yang berlokasi di pesisir laut, keadaan geografis demikian menyebabkan banyak masyarakat bekerja sebagai nelayan atau mengusahakan pertambakan udang air payau. Kondisi inilah yang menyebabkan calon-calon Bupati Pesawaran menjadikan masyarakat Desa Lempasing sebagai salah satu segmen sasaran kampanye untuk menawarkan beberapa program yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat pesisir seperti pemberdayaan masyarakat pesisir, pengobatan, pendidikan, kesehatan dan peningkatan ekonomi kaum nelayan.
2. Hasil prariset dengan melakukan observasi terhadap pelaksanaan kampanye salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati (Pattimura dan Johan Sulaiman) di Desa Lempasing Kecamatan Padang Cermin pada bulan Juni 2010 menunjukkan bahwa masyarakat pada umumnya terlihat antusias mengikuti kampanye. Hal ini terlihat dari banyaknya masyarakat yang menghadiri kampanye calon bupati dan wakil bupati tersebut.
3. Masyarakat Desa Lempasing cenderung masih tradisional dalam berpolitik, sehingga opini mereka tentang kampanye calon bupati dan wakil bupati dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan kekerabatan dalam masyarakat desa.
4. Terdapat data dan sumber data yang penulis butuhkan di Desa Lempasing Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran, sehingga sangat mendukung pelaksanaan penelitian ini.

(Sumber: Prariset pada Desa Lempasing Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran. Juni 2010)

Berdasarkan uraian di atas maka penulis melakukan penelitian mengenai opini politik masyarakat Desa Lempasing Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran terhadap kampanye semua calon Bupati Pesawaran.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Apakah kampanye calon-calon Bupati Pesawaran berpengaruh positif terhadap opini politik masyarakat Desa Lempasing Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kampanye calon-calon Bupati Pesawaran terhadap opini politik masyarakat Desa Lempasing Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya cakrawala pengetahuan dan wawasan dalam kajian ilmu pemerintahan pada khususnya dan khazanah ilmu-ilmu sosial politik pada umumnya.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai referensi dan bahan rujukan bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian dengan kajian mengenai opini politik masyarakat dalam kaitannya dengan Pemilihan Kepala Daerah pada masa-masa mendatang.